

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perhatian dunia terhadap lingkungan hidup, tercermin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio+20 pada 20-22 Juni 2012 yang menyepakati dokumen *The Future We Want* dengan mengintroduksi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai sebuah target pencapaian dan menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Topik besar yang menjadi fokus pada KTT Bumi Rio+20 adalah *green economy series* sebagai evolusi strategi pembangunan berkelanjutan (Griggs *et al.*, 2013). Secara konseptual, ekspektasi ekonomi hijau adalah terjadinya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan (Djajadiningrat *et al.*, 2014). Kecenderungan manusia untuk terus menerus mengeksploitasi sulit dihindari, sementara alam memiliki siklus yang membutuhkan waktu untuk menyediakan sumber daya yang cukup.

Di Indonesia kebijakan pembangunan berkelanjutan, ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan global, sasaran global, dan sasaran nasional RPJMN 2015-2019 SDGs ke-14 dalam Perpres tersebut adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut untuk pembangunan berkelanjutan. Peranan sumber daya dan jasa pesisir dan laut diperkirakan akan semakin meningkat di masa-masa mendatang dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Ada dua alasan pokok yang mendukung kecenderungan di atas. Pertama, bahwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun (BPS, 2017), maka pada tahun 2020 penduduk Indonesia akan mencapai 271 juta jiwa dan tahun 2035 akan menembus 300 juta jiwa (Bappenas, 2013). Hal ini akan mendorong meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan sumber daya alam dan jasa lingkungan. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam di darat semakin berkurang dan tidak lagi mencukupi, sehingga pilihan kemudian diarahkan untuk memanfaatkan sumberdaya dan jasa pesisir dan laut untuk mempertahankan dan sekaligus melanjutkan pertumbuhan yang ada. Kedua bahwa Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*archipelagic state*), dengan luas laut 6,4 juta km<sup>2</sup>, jumlah pulau yang mencapai kurang lebih 17.504 pulau, dan garis pantai

sepanjang 108.000 km memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat besar (BIG, 2018). Besarnya potensi fisik ekosistem pesisir, menyimpan fungsi pokok bagi kehidupan manusia, diantaranya: penyedia sumber daya alam hayati dan non hayati (perikanan, terumbu karang, rumput laut, mineral, bahan tambang, dan gas alam), penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan (air bersih, dan ruang) dan penyedia jasa-jasa kenyamanan (pariwisata bahari) (Marcos *et al.*, 2015), selain itu juga menyimpan manfaat jasa ekosistem yang tidak langsung dinikmati, seperti: pengendali banjir, resapan air tanah, pencegah abrasi dan erosi.

Perikanan sebagai salah satu potensi hayati ekosistem pesisir memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Menurut laporan FAO (2014) dalam *The State of World Fisheries and Aquaculture*, produksi perikanan tangkap dan budidaya Indonesia pada tahun 2012 sebagai peringkat kedua di dunia. Tingkat produksi perikanan tangkap selama tahun 2011-2012 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,7%, sedangkan persentase sumbangan terhadap produksi perikanan budidaya di dunia sebesar 27,40%. Kondisi ini memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar di dunia. Berdasarkan Tabel 1.1, total Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan Indonesia pada tahun 2015 mencapai Rp 54.717,2 miliar. Kenaikan rata-rata PDB perikanan tahun 2012-2016 yaitu 5,83% lebih tinggi dari rata-rata kenaikan PDB nasional tahun 2012-2016 yang hanya 4,83%. Keadaan ini menunjukkan terjadi peningkatan yang baik pada sektor perikanan, sehingga dapat diperhitungkan sebagai salah satu prioritas oleh para pembuat kebijakan.

Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan Indonesia atas dasar harga konstan Tahun 2010 (Tahun 2012-2016)

Subsektor	Tahun					Kenaikan Rata-rata (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
• Perikanan (Miliar Rp)	42.447,7	46.156,7	50.218,7	54.717,2	52.986,0	5,83
• PDB Nasional (Miliar Rp)	1.948.852,2	2.057.687,6	2.161.407,9	2.270.356,6	2.353.207,6	4,83
• Kenaikan per tahun	1.261,0	3.709,0	4.062,0	4.498,5	(1.731,2)	-
• Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDB Nasional (%)	2,18	2,24	2,32	2,41	2,25	-
• Laju pertumbuhan PDB perikanan (%)	3,06	8,74	8,80	8,96	(3,16)	-

Sumber: BPS, 2016b (diolah)

Potensi sumber daya perikanan yang sangat besar dimiliki oleh Indonesia juga tercermin dari kenaikan volume produksi perikanan tangkap dari laut dan perairan umum. Berdasarkan Tabel 1.2 selama tahun 2012-2016, persentase kenaikan rata-rata produksi perikanan tangkap sebesar 1,75%, sedangkan potensi lestari sumber daya perikanan di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 9,9 juta ton per tahun (KKP, 2016).

Tabel 1.2 Volume produksi perikanan tangkap di Indonesia, Tahun 2012-2016

Subsektor	Tahun					Kenaikan Rata-rata (%)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016	2015-2016
• Perikanan Laut (ribu ton)	5.436	5.707	5.897	5.993	5.720	3,52	2,35
• Perikanan Perairan Umum (ribu ton)	394	398	588	685	480	5,44	1,48
<b>Total</b>	<b>5.830</b>	<b>6.105</b>	<b>6.485</b>	<b>6.678</b>	<b>6.200</b>	<b>1,75</b>	<b>(7,16)</b>

Sumber: KKP, 2016 (diolah)

Kontribusi Provinsi DIY dalam menyumbang produksi perikanan tangkap Indonesia masih sangat rendah, sebesar 0,06% (KKP, 2016). Hal ini dikarenakan karakteristik wilayah pesisir pantai selatan Jawa merupakan perairan terbuka (*open sea*) dengan *horizon* pantainya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia (Mustafa dan Yudhicara, 2015), sehingga hanya nelayan yang mempunyai *skill* kuat yang mampu melaut. Namun, sebanyak 1.980 rumah tangga perikanan di Provinsi DIY menggantungkan hidupnya sebagai nelayan sehingga memerlukan perhatian yang serius. Selama tahun 2010-2015 perikanan tangkap dan rumah tangga perikanan laut di Provinsi DIY mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 produksinya menurun dibandingkan tahun 2014 sebesar 3.938 ton dengan RTP sebesar 1.980 (Tabel 1.3 dan Gambar 1.1).

Tabel 1.3 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut D.I. Yogyakarta 2011-2015

Tahun	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp 1.000.000)	Kenaikan Produksi (%)
2010	4.239	38.322	1
2011	3.953	54.625	-7
2012	4.094	75.942	4
2013	3.396	77.089	-17
2014	5.387	80.106	59
2015	3.938	65.542	-27
Rata-rata	4.164	65.271	2

Sumber: BPS, 2016c (diolah)

Produksi perikanan tangkap di perairan pantai selatan Provinsi D.I. Yogyakarta secara berurutan didominasi oleh Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul. Berdasarkan Tabel 1.4, dapat diketahui produksi dan nilai produksi

ikan laut di Kabupaten Gunungkidul memberikan kontribusi terbesar di Pantai Selatan Jawa DIY. Pada tahun 2015 produksi ikan laut di Kabupaten Gunungkidul sebesar 3.103,40 ton dan nilai produksi sebesar Rp 44.762.568.000.

Tabel 1.4 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut menurut Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2015

No.	Kabupaten	Produksi (ton)	Kontribusi (%)	Nilai Produksi (Rp 1.000)	Kontribusi (%)
1.	Kulon Progo	442,40	10,78	12.538.217	19,13
2	Bantul	391,80	10,00	8.241.310	12,57
3.	Gunungkidul	3.103,40	79,22	44.762.568	68,30
Total		3.937,60	100	65.542.095	100

Sumber: BPS, 2016c (diolah)

Potensi wilayah pesisir yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul ternyata cukup besar, dari 18 kecamatan dan 144 desa/kelurahan yang ada, sekitar enam kecamatan, yaitu Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo merupakan daerah pesisir (BPS Kabupaten Gunung Kidul, 2017). Enam kecamatan pesisir tersebut menyumbang produksi perikanan laut di Kabupaten Gunungkidul, yang berturut-turut didominasi oleh Kecamatan Girisubo, Tanjungsari, Saptosari, Panggang, Tepus, dan Purwosari (Tabel 1.5). Jumlah nelayan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 sebanyak 1.913 orang atau 1.002 RTP (Tabel 1.8), sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan tanpa perahu (71,4%) dan nelayan dengan menggunakan perahu tempel (23,9%). Nelayan yang memakai kapal motor hanya 4,7%), yang berada di pantai Sadeng. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kegiatan perikanan skala kecil mendominasi kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Gunungkidul (DKP Kabupaten Gunungkidul, 2016).

Tabel 1.5 Produksi Perikanan Laut Menurut Kecamatan Pesisir di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2015

No.	Kecamatan	Produksi (ton)		Kontribusi (%)	
		2014	2015	2014	2015
1.	Panggang	83,53	120,89	1,86	3,90
2	Purwosari	0,21	4,07	0,00	0,13
3.	Saptosari	106,96	158,87	2,39	5,12
4.	Tanjungsari	647,85	570,14	14,46	18,37
5.	Tepus	48,11	53,18	1,07	1,71
6.	Girisubo	3.593,88	2.196,17	80,21	70,77
Total		4.480,54	3.103,32	100	100

Sumber: BPS, 2016c (diolah)

Tabel 1.6 Rumah Tangga Perikanan Menurut Armada Penangkapan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
RTP Perahu	292	290	297	290	287
• Perahu Motor Tempel	246	242	238	242	239
• Kapal Motor	46	48	59	48	48
RTP Non Perahu	479	320	320	428	715
Total	771	610	617	718	1,002

Sumber: BPS, 2016c (diolah)

Selain potensi hayati dari sektor perikanan, jasa kenyamanan dan keindahan ekosistem pesisir dari sektor pariwisata juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Secara makro, kondisi kepariwisataan nasional mengalami peningkatan dari tahun 2010-2016. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 8,4% dibandingkan tahun 2015, peningkatan kontribusi sekitar 91,6%, dan peningkatan devisa mencapai Rp 176 -184 Triliun. Namun, kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap persentase dari total PDB menunjukkan angka relatif stabil dikisaran angka 4 persen (Tabel 1.7). *Trend* peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja juga terjadi dari tahun 2013-2016 (Tabel 1.8). Pada tahun 2016, sektor pariwisata berhasil menyerap 12 juta tenaga kerja, dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,2%, sehingga berperan memberikan akses yang luas terhadap dunia kerja.

Tabel 1.7 Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Tahun 2010-2016

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
• Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB (triliun rupiah)	261,05	296,97	326,24	365,03	394,52	461,36	500,19
• % dari total PDB	4,06	4,00	3,96	4,02	4,04	4,23	4,03

Sumber: KEMENPAR, 2017 (diolah)

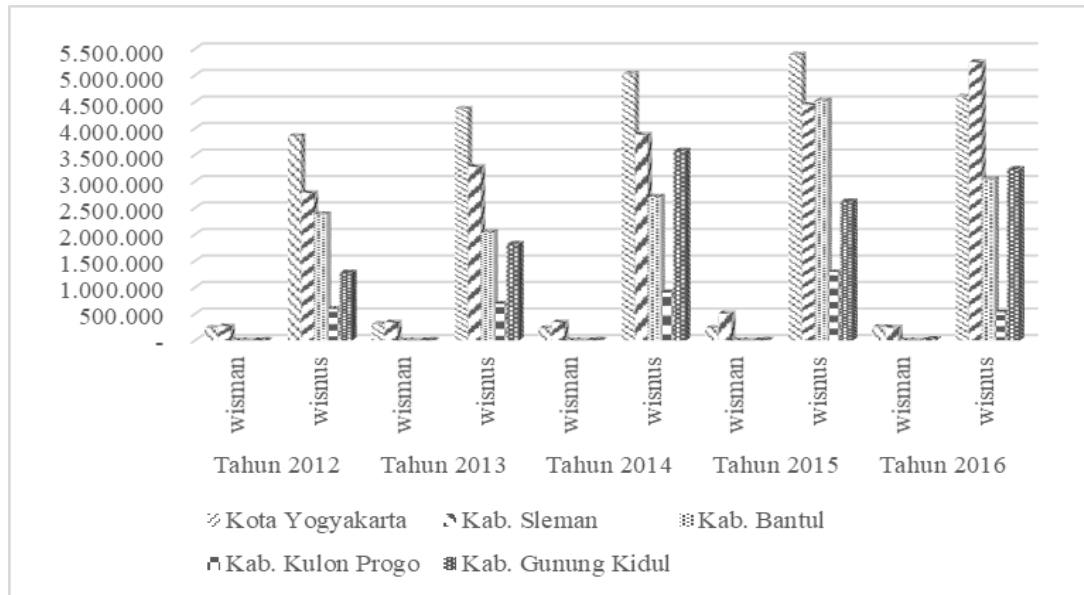
Tabel 1.8 Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja, Tahun 2013-2016

Indikator	Tahun				Pertumbuhan (%)		
	2013	2014	2015	2016	2014/2013	2015/2014	2016/2015
• Jumlah tenaga kerja (juta orang)	9,6	10,3	11,3	12	7,3	9,7	6,2

Sumber: KEMENPAR, 2017 (diolah)

Di tiga wilayah pesisir DIY, sebagian besar telah dikembangkan dan diperuntukkan bagi pengembangan wisata pantai, sedangkan aspek yang lainnya seperti wisata gua dan desa wisata masih minim dikembangkan (Yuliadi, 2013). Perkembangan

sektor pariwisata di wilayah pesisir DIY tercermin dalam kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara). Pada lima tahun terakhir 2012-2016 tercatat rata-rata wisatawan yang berkunjung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 18%. Pada tahun 2016, kunjungan wisatawan di kabupaten pesisir DIY secara berurutan didominasi oleh Kabupaten Bantul (52%), Kabupaten Gunungkidul (35%), dan Kabupaten Kulon Progo (13%) (Gambar 1.1).



Gambar 1.1 Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata di Provinsi D.I. Yogyakarta 2012-2016

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017 (diolah)

Pada tahun 2016, sektor pariwisata ini menyumbang 11,76% terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul (Tabel 1.9). Saat ini Kabupaten Gunungkidul memiliki 46 pantai yang tersebar di sepanjang garis pantai selatan, namun hanya 13 pantai yang ditetapkan sebagai obyek wisata yang dikelola pemerintah daerah, dan secara kontinyu telah menarik pengunjung wisatawan dan sudah dikenal di masyarakat umum (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2017). Ketigabelas pantai tersebut ditetapkan retribusinya berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2013 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang dikelompokkan menjadi dua kawasan. Kunjungan wisatawan di dua kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul, disajikan pada Tabel 1.10.

Tabel 1.9 Data Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2016

No.	Tahun	PAD Hasil Retribusi Daerah Sektor Pariwisata	PAD Kabupaten Gunungkidul	%
1.	2011	2.186.912.571	47.953.224.512	4,56
2.	2012	3.932.090.845	68.065.973.303	5,77
3.	2013	6.118.756.000	76.674.187.127	7,98
4.	2014	15.420.475.427	139.382.593.290	10,68
5.	2015	20.980.945.431	190.511.180.703	10,22
6.	2016	24.247.748.425	206.278.865.615,67	11,76

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2017

Tabel 1.10 Obyek Wisata Pantai dan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2016

Nama Obyek Wisata		Kecamatan	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)		
			2015	2016	2017
Kawasan 1	Pantai Baron	Tanjungsari	1.676.359	1.945.191	2.224.656
	Pantai Kukup	Tanjungsari			
	Pantai Sepanjang	Tanjungsari			
	Pantai Drini	Tanjungsari			
	Pantai Krakal	Tanjungsari			
	Pantai Sundak	Tepus			
	Pantai Pulangsawal (Indrayanti)	Tepus			
Pantai Poktunggal	Tepus				
Kawasan 2	Pantai Sadeng	Girisubo	471.910	532.179	591.964
	Pantai Wediombo	Girisubo			
	Pantai Siung	Tepus			
	Pantai Ngrehen.	Saptosari			
Total			2.148.269	2.477.370	2.816.620

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2017

Karakteristik wilayah pesisir yang spesifik merupakan agregasi dari berbagai komponen ekologi dan fisik yang saling mempengaruhi, serta secara ekologis sangat rapuh. Pemanfaatan sumber daya alam di kawasan pesisir yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip ekologi akan sangat mudah merusak proses atau fungsi ekosistem pesisir. Adanya komunitas dan multi kegiatan pada wilayah pesisir juga berpengaruh terhadap keberlanjutan kawasan pesisir (Turner, 2000).

*Problem* dan konflik yang cenderung terjadi akibat adanya *multiple management entities* adalah fragmentasi di dalam pengambilan keputusan, duplikasi/*overlapping* kewenangan (yuridiksi) adalah tidak efektif dan tidak efisien (Kumar, 2012). Agar menjadi efektif dan efisien, maka permasalahan tersebut harus dipecahkan. Campbell *et al.*, (2012) mengemukakan efektivitas pengelolaan kawasan pesisir sangat bergantung pada setiap *stakeholders* terkait untuk tunduk dan mematuhi aturan yang telah ada. Konflik kadang mempunyai dampak positif di dalam merangsang kreatifitas pemecahan

masalah di dalam manajemen publik. Namun konflik kewenangan dan kepentingan yang berkepanjangan akan menghambat pencapaian tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan wilayah dan ekosistem pesisir (Irnawati, *et al.*, 2013; Tampubolon dan Satria, 2013; Sukardjo and Pratiwi, 2015).

Adanya potensi, namun juga kesenjangan dalam pemanfaatan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul di sektor perikanan dan pariwisata akan menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan kawasan pesisir. Pengembangan model pariwisata konvensional pada umumnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan kawasan pesisir dan sosial budaya masyarakat setempat, pengembangan konsep ekowisata di kawasan pesisir adalah solusi yang tepat untuk pemanfaatan kawasan pesisir berkelanjutan (Satria, 2009; Ernawati, 2011; Muis, 2015). Pengelolaan kawasan pesisir (*coastal zone management*) di Kabupaten Gunungkidul saat ini belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Shih, 2016; Velasco *et al.*, 2018). Berdasarkan potensi dan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul, serta adanya potensi permasalahan dan konflik akibat adanya multi kegiatan yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul, maka perlu dilakukan penelitian mengenai strategi pengelolaan sumber daya pesisir di Kabupaten Gunungkidul menuju ekonomi hijau dengan mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi) serta mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait, untuk meminimalkan degradasi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Munculnya masalah penelitian yang berkaitan dengan latar belakang diatas akan dikerucutkan menjadi masalah penelitian ini, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021: "Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021". Berdasarkan RPJMD tersebut, maka pemanfaatan kawasan pesisir untuk pariwisata merupakan pemanfaatan jangka pendek yang berorientasi pada kepentingan ekonomi (peningkatan PAD) dan berlaku selama masa jabatan Kepala Pemerintah Daerah. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2017, jumlah kunjungan mencapai 2.816.620 orang



(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2017), sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas wisata. Oleh sebab itu, perlu menganalisis nilai ekonomi jasa ekosistem pesisir agar pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan (Sahubawa et al., 2015; Mehvar et al, 2018).

2. Peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul memberikan dampak negatif bagi lingkungan, yaitu meningkatnya timbunan sampah yang dihasilkan dari aktivitas yang ada di kawasan pesisir. Sampah dihasilkan dari kegiatan pariwisata, rumah makan/warung, aktivitas domestik masyarakat pesisir, aktivitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan sampah yang tertinggal akibat pasang surut air laut setiap harinya. Pencemaran lingkungan oleh sampah perlu dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu kesehatan, aktivitas kepariwisataan, dan menjaga kualitas lingkungan pesisir.
3. Pemanfaatan sumber daya ikan di Kabupaten Gunungkidul cenderung meningkat setiap tahunnya, hal ini terlihat dari jumlah kegiatan perikanan skala kecil yang mendominasi kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Gunungkidul. Data menunjukkan, jumlah nelayan tradisional di Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 67% (BPS, 2016b). Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pomeroy and Andrew (2011) dan FAO (2012) bahwa kegiatan perikanan skala kecil memberikan kontribusi terhadap sumber pendapatan dan keamanan pangan, sehingga perlu pengelolaan yang berkesinambungan untuk jangka panjang (Barnes-Mauthe et al., 2013). Tingginya pemanfaatan dari kegiatan perikanan tangkap skala kecil, tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur seperti tempat parkir perahu yang aman dan nyaman, Tempat Pelelangan Ikan/TPI yang higienis, dan teknologi pengolahan ikan agar memiliki nilai tambah. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah, agar kegiatan perikanan ditingkatkan perannya untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul.
4. Belum adanya penataan ruang yang baik dalam hal sarana prasarana dan zonasi antara kegiatan wisata dan perikanan juga menjadi permasalahan di Kawasan Pesisir Gunungkidul. Permasalahan ini pada akhirnya menimbulkan konflik antara pengelola kawasan wisata dan nelayan. Konflik di pesisir terjadi pada aspek sosial dan ekonomi (Fisher et al., 2001; Brown and Raymond, 2013). Adanya kontestasi sektoral sumber daya alam dan jasa lingkungan di kawasan pesisir dan laut ditandai dengan tumpang tindihnya regulasi, lemahnya sinergi, dan koordinasi

masing-masing sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring (Mujio et al., 2016). Oleh karena itu diperlukan identifikasi kepentingan dan pengaruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan SDA dan jasa lingkungan pesisir (Reed, 2009; Kivits, 2011), agar diperoleh keseimbangan (*balancing*) antara kepentingan ekonomi dan ekologi serta sosial masyarakat pesisir.

Rumusan pernyataan permasalahan utama dalam penelitian ini berdasarkan uraian tersebut diatas adalah: belum teridentifikasinya karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pesisir (*coastal zone management*) yang berbasis ekonomi hijau dan belum adanya sinergitas pengelolaan sumber daya alam di kawasan pesisir yang melibatkan seluruh *stakeholders* (masyarakat pesisir, instansi sektor pariwisata dan perikanan, serta *stakeholders* lainnya).

Pertanyaan penelitian secara khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan pemanfaatan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana nilai ekonomi pengelolaan jasa lingkungan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau di Kabupaten Gunungkidul?
3. Bagaimana rumusan strategi pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul berbasis ekonomi hijau?

### **1.3 Ruang Lingkup Studi**

Beberapa batasan masalah yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Penelitian dilakukan di enam pesisir pantai yang memiliki kegiatan utama di sektor perikanan dan pariwisata,
2. Jenis responden merupakan masyarakat pesisir yang bermukim di enam desa pesisir dan wisatawan yang berkunjung ke pesisir pantai,
3. *Stakeholders* yang digunakan hanya di level provinsi dan kabupaten, tidak melibatkan *stakeholder* pusat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat,
4. Bentuk pengelolaan kawasan pesisir hanya dilihat dari faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, tidak melibatkan faktor perundang-undangan dan kelembagaan.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan pemanfaatan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul,
2. Menganalisis nilai ekonomi pengelolaan jasa lingkungan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau di Kabupaten Gunungkidul,
3. Merumuskan strategi pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul berbasis ekonomi hijau.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang dapat ditinjau secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bentuk pengelolaan jasa lingkungan pesisir yang berbasis pada ekonomi hijau yang mengintegrasikan bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan memberikan kontribusi teori manajemen pesisir (*costal zone management*) yang adaptif berdasarkan model valuasi ekonomi dan analisis *stakeholders*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
  - a. Menyusun kebijakan pengelolaan kawasan pesisir berbasis ekonomi hijau,
  - b. Bahan rekomendasi bagi *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya alam dan jasa lingkungan pesisir berbasis ekonomi hijau,
  - c. Bahan penelitian lanjutan terkait pengelolaan kawasan pesisir,
  - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang.

#### 1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai strategi pengelolaan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Beberapa penelitian tentang pengelolaan kawasan pesisir telah dilakukan antara lain: *Intergrated Coastal Management* (Wever et al., 2012; Ramsey et al., 2015) dengan obyek Antigua, Barbuda, Brazil, dan Indonesia yang bersifat top-down dalam penyusunan kebijakan pengelolaan pesisir; *Community Based Coastal Resource Management* (Crawford et al., 2008, Kearney, 2007) dengan obyek pesisir Sulawesi dan Kanada, dan *Coastal Ecosystem Based*

*Management* (Stevenson and Tissot, 2013; Lopes et al., 2015) dengan obyek penelitian di kawasan perlindungan laut di Hawaii dan Brazil. Model pengelolaan pesisir yang dilakukan pada penelitian diatas masih belum mampu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Beberapa penelitian valuasi ekonomi dengan obyek kawasan pesisir dilakukan oleh Yacob dan Shuib (2009) dengan obyek *Marine Park* Malaysia, Torres and Hanley (2016) dengan obyek pesisir Skotlandia, Söderqvist, et al., (2015) dengan obyek pesisir Swedia, Hanley, et al., (2015) dengan obyek pesisir Inggris, penelitian tersebut lebih pada valuasi ekonomi lingkungan alam (kualitas air di pesisir dan pariwisata bahari), sedangkan di Indonesia, penelitian valuasi ekonomi pesisir difokuskan pada masing-masing ekosistem yang ada di kawasan pesisir (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) seperti penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al., (2016) dengan obyek ekosistem terumbu karang di Pantai Wediombo, Kabupaten Gunungkidul; SuE, et al., (2015) dengan obyek ekosistem mangrove Pulau Enggano; dan Tahang, et al., (2018) dengan obyek hutan mangrove di Kabupaten Sinjai. Penelitian valuasi ekonomi yang lain difokuskan pada pariwisata pantai seperti penelitian yang dilakukan oleh Pieter, et al., (2015) dengan obyek Pantai Lesiana, Kota Kupang; Efendi, et al., (2015) dengan obyek wisata Pulau Tangkil, Provinsi Lampung; maupun Gaib, et al., (2017) dengan obyek wisata Pantai Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

Penelitian ini menggunakan penilaian non-pasar barang dan jasa lingkungan pesisir melalui penentuan kesediaan membayar (*WTP*), dengan menyatukan tujuan seluruh *stakeholders* dan memberikan pengetahuan ekologi-ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul. Langkah-langkah merumuskan strategi pengelolaan pesisir menuju ekonomi hijau adalah (1) analisis valuasi ekonomi (*contingent valuation method*) kawasan pesisir (Östberg, et al., 2012; Lee, 2016; Torres and Hanley, 2016); dan (2) analisis *stakeholders* (Jepson and Eskerod, 2009; Reed, et al., 2009). Variabel utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah *WTP* responden untuk mengelola obyek penelitian yang berkelanjutan, sedangkan variabel penting lainnya adalah pendidikan, pendapatan, umur, keberadaan, manfaat, kepentingan, dan partisipasi, dengan metode *Contingent Valuation Method (CVM)* seperti penelitian yang dilakukan oleh Östberg, et al., (2012); Lee (2016); dan Torres and Hanley (2016).

Penelitian ini menganalisis pengelolaan kawasan pesisir yang mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi ke arah *ecosystem based* yang bersahabat dengan kepentingan *stakeholders* yang terlibat, dengan orisinalitas yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Valuasi ekonomi jasa lingkungan non pasar dengan obyek kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul. Variabel yang dianalisis meliputi variabel ekonomi dan variabel karakteristik demografi. Penelitian di obyek ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
2. Kombinasi valuasi ekonomi dengan analisis *stakeholders* untuk mengeksplorasi alternatif strategi yang harus dilakukan ke depan dalam kebijakan pengelolaan kawasan pesisir menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.